ETIKA POLITIK TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN HARYATMOKO
(STUDI KOMPARATIF)

Disusun Oleh:

Desi Fitriani Siregar
18205010067

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KONSENTRASI FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2020 M

PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Desi Fitriani Siregar
NIM	: 18205010067
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah **tesis** ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
F0B2EAHF146806824
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Desi Fitriani Siregar
NIM: 18205010067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-895/Un.02/DU/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : "Etika Politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko (Studi Komparatif)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DESI FITRIANI SIREGAR, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 18205010067
Telah diujikan pada : Senin, 13 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f224c3913e79

Penguji I

Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f10123b8d75c

Penguji II

Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
SIGNED

Valid ID: 5f10352e1fd75

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM REPUBLIK INDONESIA

Yogyakarta, 13 Juli 2020
UIN Sunan Kalijaga
Plt. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f2564aa3b577

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 03/08/2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Etika Politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko (Studi Komparatif)

Yang ditulis oleh :

Nama	: Desi Fitriani Siregar
NIM	: 18205010067
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi	: Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Juli 2020
Pembimbing

Dr. Mutiullah S.Fil.I.M.Hum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstrak

Etika politik pada zaman sekarang seolah tidak berlaku lagi, bahkan cenderung menghilang. Realitas yang ada menunjukkan politik sebagai ajang pertarungan kekuatan dan kepentingan, sehingga terdapat kecenderungan umum untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Korupsi, politik uang dan kekerasan mewarnai dunia politik di Indonesia, bahkan melekat erat dengan praktik kekuasaan. Menurut Haryatmoko, diperlukan etika politik yang di satu sisi tidak disukai penguasa karena selalu mengkritisi, namun di sisi lain bisa diperalat penguasa untuk memperoleh legitimasi atas kekuasaannya. Ditengah carut marutnya wajah perpolitikan saat ini, ada perbincangan yang tak kalah hangat tentang khilafah. Taqiyuddin an-Nabhani dengan konsep kekuasaan *Daulah Khilafah Islamiyah* dan cara pandang hidup Islam secara menyeluruh mampu menyita perhatian. Filsafat politiknya yang cukup radikal dan gerakan politik Islam Hizbut Tahrir yang didirikan menjadikan konsep dan gerakan politiknya mulai diperhitungkan di kancah politik global. Problem etika politik saat ini tidak terlepas dari pandangan Haryatmoko dan Taqiyuddin an-Nabhani. Walaupun kedua tokoh ini berada dalam masa dan zaman yang sangat jauh berbeda. Disini penulis ingin melihat konsep etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko yang bisa menjadi tawaran yang harus dipertimbangkan oleh elit politik. Penjelasan yang muncul akan dianalisis melalui teori etika politik al-Mawardi. Etika politik dari kedua tokoh ini diharapkan dapat memberikan visi kemanusiaan dan solusi yang jelas terhadap kesenjangan yang ada.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Hasil dari penelitian ini adalah: Konsep etika politik Taqiyuddin an-Nabhani berorientasi kepada kebaikan dan kesejahteraan bersama. Konsep pemerintahan yang dikemukakan an-Nabhani terlihat berbeda dan unik karena antara Tuhan dan umat mempunyai peran dan fungsi yang berbeda akan tetapi saling terkait dengan erat dan mengikat. Legitimasi kekuasaan yang dikemukakan oleh an-Nabhani berdasarkan legitimasi yang dilakukan dilakukan oleh umat (rakyat) kepada seorang pemimpin yang disebut khalifah. Metode legitimasi kekuasaan terhadap khalifah dilakukan dengan cara di *baiat* atau diangkat oleh umat dan menjadikan khalifah mempunyai kewenangan tertinggi untuk melaksanakan aturan atau *syara'*. Sedangkan konsep etika politik Haryatmoko berorientasi kepada hidup baik, bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik ini membantu untuk menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekedar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Komparasi etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko menemukan adanya titik temu dan titik pisah diantara kedua tokoh tersebut. Titik temunya adalah bahwa Taqiyuddin An-Nabhani dan Haryatmoko melandasi legitimasi kekuasaannya dari rakyat kepada pemimpinnya dan adanya tiga dimensi dalam etika politiknya, yaitu tujuan, sarana dan aksi politik. Sedangkan titik pisah yaitu terkait dengan sistem pemerintahannya, Taqiyuddin an-Nabhani menghendaki sistem khilafah.

Kata Kunci: **Taqiyuddin an-Nabhani, Haryatmoko, Etika politik.**

Abstract

Today's political ethics are no longer valid, they even tend to disappear. The existing reality shows that politics is a battleground for power and interests, so there is a general tendency to justify any means to achieve goals. Corruption, money politics and violence characterize the political world in Indonesia, and are even closely related to the practice of power. According to Haryatmoko, political ethics is needed which on the one hand the authorities do not like because they always criticize, but on the other hand the authorities can use them to gain legitimacy for their power. In the midst of the current chaotic face of politics, there is a conversation that is no less warm about the Caliphate. Taqiyuddin an-Nabhani with the concept of power of the Khilafah Islamiyah Daula and a whole perspective of Islamic life is able to attract attention. Its quite radical political philosophy and the Islamic political movement Hizb ut-Tahrir which was established made its political concepts and movements to be taken into account in the global political arena. The current political ethics problem cannot be separated from the views of Haryatmoko and Taqiyuddin an-Nabhani. Although these two figures are in very different times and eras. Here the author wants to see the political ethics concept of Taqiyuddin an-Nabhani and Haryatmoko which can be an offer that must be considered by the political elite. The explanation that emerges will be analyzed through al-Mawardi's theory of political ethics. It is hoped that the political ethics of the two figures will provide a clear humanitarian vision and solutions to existing gaps.

This research is a type of library research, namely research conducted using literature (literature) in the form of books, notes, and research reports from previous researchers. The results of this study are: The concept of Taqiyuddin an-Nabhani's political ethics is oriented towards the common good and prosperity. The concept of government proposed by an-Nabhani looks different and unique because between God and the people have different roles and functions but are closely interrelated and binding. The legitimacy of power expressed by an-Nabhani is based on the legitimacy carried out by the ummah (people) to a leader called the caliph. The method of legitimacy of power over the caliph is carried out by way of baiat or appointed by the people and makes the caliph have the highest authority to carry out the rules or shara '. Meanwhile, the concept of Haryatmoko's political ethics is oriented towards living well, together and for others in order to broaden the scope of freedom and build equitable institutions. This definition of political ethics helps to analyze the correlation between individual action, collective action and existing structures. Emphasizing the existence of this correlation avoids the understanding of political ethics which is reduced to merely individual ethics of individual behavior in the state. Comparison of Taqiyuddin an-Nabhani and Haryatmoko's political ethics found a meeting point and a split point between the two figures. The meeting point is that Taqiyuddin An-Nabhani and Haryatmoko underlie the legitimacy of his power from the people to their leaders and the existence of three dimensions in political ethics, namely objectives, facilities and political action. Whereas the breaking point is related to the government system, Taqiyuddin an-Nabhani wants the khilafah system.

Keyword: **Taqiyuddin an-Nabhani, Haryatmoko, Political Ethics.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Śa’	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ’	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Aīn	„	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	„El
م	Mīm	M	„Em
ن	Nūn	N	„En
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta'addidah*
عِدَّة	Ditulis	*'Iddah*

B. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila ta' marbūtâh di baca mati ditulis dengan *h,* kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti Salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*Ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta' marbūtâh* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَمَةُ الأَوْلِيَاء	ditulis	*Karāmah al-auliā'*

3. Bila *ta' marbūtâh*hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ, dan dâmmah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

C. Vokal Pendek

َ	*Fathâḥ*	Ditulis	A
ِ	*Kasraḥ*	Ditulis	I
ُ	*Dâmmah*	Ditulis	U

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Vokal Panjang

Fathâḥ + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	Ā *Jāhiliyah*
Fathâḥ + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā *Tansā*
kasraḥ + ya' mati كَرِيْم	Ditulis Ditulis	Ī *Karīm*
Dâmmah + wawu mati فُرُوْض	Ditulis Ditulis	Ū *Furūd*

E. Vokal Rangkap

Fathâḥ + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai *Bainakum*
Fathâḥ + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au *Qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof („).

أَأَنْتُمْ	Ditulis	*A'antum*
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'in syakartum*

G. Kata Sandang Alīf + Lām

1. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al.

أَلْقُرْاَن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	*As-Samā*
الشَّمْس	Ditulis	*As-Syams*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِى الْفُرُوْض	Ditulis	*Żawî al-furūd*
أَهْل السُّنَّة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧

"Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (Q.s. Muhammad [47]: 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk Ayah dan Ibuku tercinta yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya, mengorbankan jiwa dan raganya dan ketulusan hatinya untuk anak-anaknya yang tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Swt., karena kita masih diberi limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat merasakan nikmat kesehatan dan kesempatan hingga detik ini. Dan Alhamdulillah berkat karunia yang di berikan oleh Allah, sehingga saya masih menyelesaikan tesis dengan judul "Etika Politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko".

Kemudian sholawat bertangkaikan salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Saw. Yang mana karena perjuangan dari dakwah beliau yang tak kenal lelah dan henti sebelum Islam Itu tegak dibumi Allah Swt. sehingga beliau rela mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan nyawanya demi diembannya Risalah Islam ke seluruh penjuru dunia ini. Dan karena perjuangan dakwah beliau, sehinggga kita dapat merasakan nikmat manisnya Iman, Islam dan Ihsan sampa saat ini.

Oleh karena itu, marilah senantiasa kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Saw. agar kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak, dan sudah sepantasnya kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang wajib kita ikuti dalam kehidupan ini.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang sangat membantu penulis dalam berbagai hal. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Terkhusus untuk Orangtua tercinta yang telah banyak memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis baik secara moril maupun materil, sehingga tesis ini dapat diselesaikan penulis.
2. Dr. Mutiullah S.Fil.I. M.Hum., selaku pembimbing tesis ini. Semoga beliau diberikan kesehatan dan keberkahan.
3. Dr. H. Zuhri, S.Ag. M.Ag selaku ketua Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Seluruh Dosen, staf dan karyawan Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
5. Abang dan adik tercinta serta keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan semangat kepada penulis.
6. Sahabat serta rekan-rekan seperjuangan tercinta yang tak henti memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

Yogyakarta, 02 Juli 2020

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME ..... **ii**

PENGESAHAN TESIS ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **vii**

MOTTO ..... **xii**

PERSEMBAHAN ..... **xiii**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 14
F. Metode Penelitian 16
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II PERGULATAN POLITIK DAN AGAMA **20**

A. Kelahiran Sang Pembaharu 20
B. Kelahiran Sang Filsuf 33

BAB III POLITIK WACANA ETIKA POLITIK **43**

A. Pengertian Etika Politik 43
B. Ruang Lingkup Etika Politik 46
C. Esensi Etika Politik Islam 51
D. Pemikiran al-Mawardi tentang Etika Politik 53

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV INTERELASI ANTARA POLITIK DAN AGAMA: POKOK-POKOK PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN HARYATMOKO 72

A. Etika Politik Taqiyuddin an-Nabhani 73
   a. Politik Menurut Taqiyuddin an-Nabhani 73
   b. Kekuasaan dalam Etika Politik 75
   c. Pandangan Islam tentang Manusia dan Kehidupan 78
   d. Islam dan Negara 81
   e. Sistem Khilafah Menurut Taqiyuddin an-Nabhani 82
B. Etika Politik Haryatmoko 89
   a. Etika Politik sebagai Titik Filsafat Politik 89
   b. Dimensi-Dimensi Etika Politik 90
   c. Kekhasan Etika Politik 98
   d. Dimensi Etika dalam Dialektika Aktor dan Sistem 100
   e. Dialog dalam Analogi Permainan 109

BAB V IDEALITAS POLITIK DAN KUASA: TITIK TEMU DAN TITIK PISAH TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN HARYATMOKO 113

A. Tanggung Jawab Politik dan Kuasa: Titik Temu Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko 115
B. Masa Depan Politik Dunia Antara Khilafah dan Demokrasi: Titik Pisah Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko 119
C. Visi Kemanusiaan dalam Etika Politik al-Mawardi: Upaya Membedah Pokok-pokok Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko 122

BAB VI PENUTUP 139

A. Kesimpulan 139
B. Saran 142

DAFTAR PUSTAKA.....144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika politik pada zaman sekarang seolah tidak berlaku lagi, bahkan cenderung menghilang. Realitas yang ada menunjukkan politik sebagai ajang pertarungan kekuatan dan kepentingan, sehingga terdapat kecenderungan umum untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Padahal, Nietzsche dengan lantang meneriakkan bahwa esensi etika yang dibangun dalam politik itu ditentukan oleh penilain baik dan buruk. Tetapi, pragmatisme politik sudah terlanjur merusak etika para politikus. Salah satunya adalah praktik *money politics* (transaksi politik) yang dilakukan para politikus pada pemilihan umum. Perilaku elit politik seperti ini benar-benar tidak mendidik rakyat. Mereka menjadi contoh yang buruk dalam berpolitik. Jika hal ini terus terjadi, maka tidak ada etika dalam berpolitik. Padahal, seharusnya elit politik menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya, yaitu memiliki akhlak dan perilaku politik yang baik, memiliki kesabaran, kesederhanaan, menjunjung persamaan, keadilan dan lain sebagainya.[1]

Kajian tentang etika politik di sini bukan hanya berbicara masalah perilaku elit politik, tetapi juga terkait pandangan tentang manusia dan kekuasaan. Selain itu, etika politik sangat terkait dengan hukum dan kekuasaan.[2] Fungsi etika politik adalah untuk mengkritisi legitimasi secara rasional, objektif, dan argumentatif. Tugas etika politik bukan untuk

[1]M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Jakarta: Transmisi Media, 2009), h. 34.
[2]Frans Magniz Suseno, *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. x.

mencampuri politik praktis, tetapi membantu agar masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik sebagai patokan orientasi dan pandangan normatif bagi politisi untuk melaksanakan kekuasaan secara bermartabat.[3]

Korupsi, politik uang dan kekerasan mewarnai dunia politik di Indonesia, bahkan melekat erat dengan praktik kekuasaan. Bagaimana mengatasinya? Menurut Haryatmoko, diperlukan etika politik yang di satu sisi tidak disukai penguasa karena selalu mengkritisi, namun di sisi lain bisa diperalat penguasa untuk memperoleh legitimasi atas kekuasaannya. Dalam buku etika politik dan kekuasaannya, Haryatmoko dengan piawai menjelaskan berbagai perspektif kekuasaan, termasuk di dalamnya pemahaman agama, fanatisme, radikalisme, konflik, penguasaan ekonomi serta manipulasi ideologi.

Ditengah carut marutnya wajah perpolitikan saat ini, ada perbincangan yang tak kalah hangat tentang khilafah. Taqiyuddin an-Nabhani dengan konsep kekuasaan *Daulah Khilafah Islamiyah* dan cara pandang hidup Islam secara menyeluruh mampu menyita perhatian. Filsafat politiknya yang cukup radikal dan gerakan politik Islam Hizbut Tahrir yang didirikan menjadikan konsep dan gerakan politiknya mulai diperhitungkan di kancah politik global.[4] Konsep kekuasaan Taqiyuddin an-Nabhani dalam tinjauan etika politik mengarah kepada kajian politik yang beretika dan secara khusus fokus kepada

[3]Magnis Suseno, *Etika Politik...*, h. 2-3.

[4]Mohammad Topan, *Kekuasaan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani Dalam Tinjauan Etika Politik*. Jurnal Filsafat, Vol. 23, No. 2, Agustus 2013, h. 149. Dalam https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/13218. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018, jam 13.15.

legitimasi kekuasaan yang menjadi pijakan argumen dan tindakan politik praktis.

Menurut an-Nabhani, kekuasaan dalam etika politik berbicara mengenai landasan etis yang menjadi legitimasi bagaimana kekuasaan itu didapatkan serta dipertahankan. Teori dan praktiknya harus mengacu kepada aspek moral yang berasal dari tradisi, adat-istiadat, agama atau ideologi. Representasi kekuasaan melalui negara, hukum dan kelembagaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam interaksi sesama manusia ketika hidup bersama. Kekuasaan dalam konsep dasar etika politik berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan bersama. Konsep kekuasaan yang dikemukakan an-Nabhani lebih mendekati kepada sumber kekuasaan Teokrasi. Karena an-Nabhani merujuk kepada firman sebagai sumber legitimasi untuk meraih kekuasaannya. Konsep pemerintahan yang dikemukakan oleh an-Nabhani memang terlihat berbeda dan unik karena antara Tuhan dan umat mempunyai peran dan fungsi yang berbeda akan tetapi saling terkait dengan erat dan mengikat. Islam tidak memisahkan anatara kehidupan dunia dan akhirat, rumah tangga, negara, ekonomi, sosial, budaya, dan syariat. Karena itu kekuasaan yang diraih adalah demi mewujudkan umat yang adil, sejahtera, bermartabat sesuai dengan ajaran Islam.[5]

Apabila dicermati secara mendalam dan teliti, sangat menarik membahas politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko yang penuh dengan muatan etika. Sehingga penulis mencoba untuk mengkomparasikan etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko. Walaupun tidak ada

[5]Topan, *Kekuasaan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani...*, h. 153-155.

satupun karya dari Taqiyuddin yang menulis etika secara jelas. Namun ketika didalami dan dikaji secara rinci, ternyata isi kitab-kitab yang ditulis Taquyiddin an-Nabhani sangat penuh dengan muatan politik dan etika. Apalagi ditengah konflik yang dihadapi oleh partai yang didirikan yaitu Hizbut Tahrir dan secara tidak langsung ikut membesarkan nama Taqiyuddin an-Nabhani, maka ini menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan atau didialogkan dengan para aktivisnya baik itu kepada sesama aktivis, civitas akademik, maupun masyarakat umumnya. Karena apa yang terjadi dikalangan elit politik pada faktanya banyak yang menyalahi etika politik, terutama dengan adanya tindakan pembungkaman dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang dilakukan oleh pemerintah. Disini penulis ingin melihat bagaimana konsep etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko mampu memberikan tawaran solusi terhadap permasalahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini akan dispesifikkan menjadi:

1. Bagaimana konsep etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko?
2. Bagaimana komparasi etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini juga memiliki tujuan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Mengetahui konsep etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko
2. Mengetahui komparasi etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko

Adapun kegunaan penelitian dari penelitian ini yaitu;

1. Dalam wilayah teoritis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bangunan sejarah etika politik yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan dan menjadi referensi bagi rujukan etika politik Taqiyuddin an-Nabhani, karena belum ada yang membahas etika politik an-Nabhani dalam bidang akademik. Dengan kata lain, tujuan pertama penelitian ini adalah inventarisasi, meskipun penelitian ini tidak mengkaji secara keseluruhan tentang etika politik. Di samping itu, dari penelitian ini diharapkan ada kajian etika politik yang lebih mendalam yang dapat disandingkan dengan etika politik secara umum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam melihat fenomena manusia tertentu secara etika, terutama dalam masyarakat Islam yang dapat dijadikan landasan dalam mengambil suatu keputusan moral maupun politik, sehingga tidak ada masyarakat atau kelompok tertentu yang terpinggirkan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini, penulis menemukan tesis yang membahas mengenai pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pertama, Ashar M Idris dalam tesisnya yang berjudul *Konstruksi Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam Pembentukan Kepribadian Islam* pada Pascasarjana IAIN Kendari tahun 2017. Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan karya-karya populernya terkait pembentukan kepribadian Islam dan untuk mendeskripsikan konsep dasar pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani serta mengetahui konstruksi pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam pembentukan kepribadian Islam.

Kedua, Muhammad Herowandi dalam tesisnya yang berjudul *Kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Pancasila (Studi Kasus di DPD Hizbut Tahrir Indonesia)* pada Pascasarjana Universitas Lampung tahun 2017. Fokus penelitiannya mendeskripsikan kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pancasila, metode pergerakan HTI, dan bagaimana kelompok lain memandang ormas HTI.

Ketiga, Ridho Anugrah dalam tesisnya yang berjudul *Politik Perang dalam Negara Khilafah dalam Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani* pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2016. Fokus penelitiannya adalah *Pertama*, politik perang dalam pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani merupakan suatu manajemen peperangan agar kemenangan berpihak pada umat Islam dan kekalahan menimpa pihak musuh. Politik perang berkaitan dengan dimensi praktis dan aktual. Menurutnya, agama memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang dan melarang hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan dalam kondisi perang. *Kedua*, relevansi pemikiran an-Nabhani dengan konteks kekinian, bahwa dalam HHI (Hukum Humaniter Internasional), Pasal 3 DUHAM, Pasal 6 ICCPR, Konvensi Jenewa secara umum senada dengan

etika perang dalam fiqih klasik sekaligus relevan dengan pendapat an-Nabhani.

Keempat, Neng Yeti Nurhayati dalam tesisnya yang berjudul Dinamika Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI): Studi Gerak Dakwah Politik HTI Pasca Era Reformasi pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati tahun 2016. Fokus penelitiannya adalah mengetahui keberadaan HTI sebagai gerakan politik Islam Ekstraparlementer dan cara-cara yang mereka tempuh untuk mewujudkan cita-citanya, teori dan konsep-konsep yang relevan dengan keberadaan sistem pemerintahan di Indonesia.

Kelima, Yusnita Hasibuan dalam tesisnya yang berjudul *Konsep Kepribadian Muslim Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani* pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara tahun 2016. Fokus penelitiannya adalah menjelaskan syaksiyah Islamiyah menurut syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ditinjau dalam berbagai buku karangannya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang diharapkan dapat terjawab, yaitu: *Pertama*, apa dasar pembentukan kepribadian muslim menurut syaikh Taqiyuddin an-Nabhani? *Kedua*, bagaimana aplikasi kepribadian muslim dalam kehidupan menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani? *Ketiga*, bagaimana perkembangan dan pembinaan kepribadian muslim dalam kehidupan menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani?

Keenam, Dodi Okri Handoko dalam tesisnya yang berjudul *Analisis Pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani Tentang Privatisasi Aset-aset Publik* pada Pascasarjana UIN Syarif Kasim tahun 2013. Fokus penelitiannya

adalah pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang privatisasi aset publik yang kemudian ditinjau menurut perspektif Islam.

Ketujuh, Deni Junaidi dalam tesisnya yang berjudul *Bendera di Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Konteks Sejarah, Konteks Budaya dan Estetika Semiotik)* pada Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Fokus penelitiannya adalah mengkaji bendera yang digunakan Hizbut Tahrir Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (HTI DIY). Partai politik yang tidak masuk dalam parlemen ini menggunakan dua jenis bendera, *liwa* dan *rayah*. *Liwa* berwarna putih dan *rayah* berwarna hitam yang bertuliskan kaligrafi Arab. Bendera itu dikaji dari konteks sejarah, budaya dan estetika semiotik.

Kedelapan, Agustina Setianingrum dalam tesisnya yang berjudul *Perkembangan Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia* pada Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2011. Fokus penelitiannya adalah membahas perkembangan gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia. Hizbut Tahrir merupakan gerakan transnasional yang ada di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Hizbut Tahrir berkeinginan untuk mendirikan khilafah Islamiyah dan menerapkan syariat Islam.

Kesembilan, Setyabudi Daryono dalam tesisnya yang berjudul *Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin an-Nabhani* pada Pascasrjana UIN Sultan Syarif Kasim tahun 2011. Fokus penelitiannya adalah kenyataan bahwa berbagai sistem pemerintahan yang ada di dunia saat ini sangat jauh dari sistem pemerintah an Islambaik dari segi bentuk maupun isinya. Dari segi isinya sangat jelas bagi kaum muslim, yakni bahwa semua sistem

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemerintahan kontemporer saat ini tidak diambil dari al-Qur'an dan Sunnah serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya.

Kesepuluh, Zulfadli dalam tesisnya yang berjudul *Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta* pada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2010. Fokus penelitiannya adalah infiltrasi gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Diantara gerakan lain, HTI merupakan salah satu gerakan penegak syariat yang paling solid, rapi, dan memiliki jaringan internasional. Bahkan HTI dikenal paling radikal, dalam arti tidak hanya berjuang menegakkan syariat Islam tapi lebih dari itu juga mendirikan khilafah Islam karena syariat Islam *kaffah* (total) tidak bisa diterapkan kecuali dalam kerangka negara khilafah.

Disertasi siti Jamilah yang berjudul *Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam Gerakan Sosial Islam: Analisis Gerakan HTI di Kota Pare* pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2014. Fokus penelitiannya adalah membahas tentang pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam gerakan Islam, gerakan sosial yang disorot adalah HTI yang mendeklarasikan diri sebagai partai politik.

Terkait dengan jurnal, penulis menemukan Jurnal dari Budiyono tentang *Menjaga Etika dalam Berpolitik* tahun 2019. Fokus penelitiannya adalah politik bukan hanya sekedar berburu kekuasaan dengan manghalalkan segala cara tanpa mengindahkan etika dan moral. Sejatinya, politik merupakan kegiatan warganegara untuk membicarakan kebaikan bersama atau kepentingan publik yang dilandasi oleh nilai-nilai moral. Berpolitik merupakan sebuah aktifitas pengabdian yang berpijak pada kehendak umum

demi kesejahteraan masyarakat dan mengesampingkan kepentingan kelompok dan individu. Berpolitik secara elegan akan menumbuhkan kedewasaan dan kematangan demokrasi.

Jurnal dari Hartati dan Firmansyah Putra tentang *Etika Politik dalam Politik Hukum di Indonesia (Pancasila sebagai Suatu Sistem Etika)* tahun 2019. Fokus penelitiannya adalah etika pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Peran sentral terhadap cita demokrasi yang beriringan dengan cita nomokrasi adalah suatu keniscayaan. Pembangunan politik hukum melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elit politik untuk memberikan gambaran besar dalam menghadapi persoalan bangsa saat ini.

Jurnal dari Romario tentang *Hizbut Tahrir Indonesia dalam Ruang Media Sosial Instagram* tahun 2019. Fokus penelitiannya adalah penyebaran akun aktivis HTI di Media Sosial seperti Felix Siauw, Ismail Yusanto dan akun media yaitu ¯Ta biin.ID, ¯M ediaUmat, dan ¯Musl imahMediaCenter yang dengan aktif merespon segala isu yang faktual dan menarasikan dengan retorika yang mengarah kepada khilafah dan anti terhadap segala ide yang berasal dari Barat baik sekularisme, demokrasi, dan liberalisme.

Jurnal dari Gus Din El-Haq dan Iwandi tentang *Metode Pembentukan Kepribadian Islami Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani* tahun 2018. Fokus penelitiannya adalah menjelaskan metode pembentukan kepribadian Islami yang dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu: *pertama*, menanamkan akidah Islam, *kedua* menanamkan tasqofah Islam dan *ketiga* senantiasa

membangun keterikatan aqliyah dan nafsiyah dengan akidah Islam serta tsaqofah Islam.

Jurnal dari Azman tentang *Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia* tahun 2018. Fokus penelitiannya adalah membahas gerakan dan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia, di mana gerakan dan pemikirannya memuat profil pendiri Hizbut Tahrir Indonesia, sejarah Hizbut Tahrir Indonesia.

Jurnal dari Nilda Hayati tentang *Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi)* tahun 2017. Fokus penelitiannya adalah kajian living Qur'an dengan menggunakan perspektif komunikasi. Objek kajian yang akan ditelusuri adalah konsep khilfah Islamiyah sebagaimana yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam menyebarluaskan doktrin khilafah, organisasi tersebut menggunakan berbagai efek media komunikasi.

Jurnal dari Syaiful Arif tentang *Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia* tahun 2016. Fokus penelitiannya adalah mengekplorasi pandangan HTI tentang syariah dan posisinya untuk sistem negara kekhalifahan dan kemuliaan politik Islam yang berusaha membangun dunia global serta di Indonesia secara rasional.

Jurnal dari M. Sidi Ritaudin tentang *Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis dan Rasional Politik Bangsa* tahun 2014. Fokus penelitiannya adalah adanya muatan etika politik yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, watak

baru yang berakar budaya, berwatak progresif dan memihak bangsa. Kedua, kebhinekaan, kebersamaan, kerukunan dan kebangsaan Indonesia perlu dirajut ulang serta pancasila ditegakkan kembali. Ketiga, membela rasa keadilan rakyat, mengabdi kepada Ibu Pertiwi demi kesejahteraan rakyat dan kemuliaan negara.

Jurnal dari Thahir Maloko tentang *Etika Politik dalam Islam* tahun 2013. Fokus penelitiannya adalah etika politik dan moral kepemimpinan Islam sangat ditentukan oleh penguasa. Oleh karena itu, yang menghendaki sebuah pemerintahan yang adil dan didasari oleh nilai etika, maka harus banyak belajar dari realitas yang terjadi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sehingga tercipta suatu kedamaian. Sebuah pemerintahan yang tidak didasari nilai-nilai etika dan moral yang baik akan menimbulkan kekacauan. Apalagi pemimpinnya yang tidak menanamkan nilai etika, sudah pasti kekuasaanya akan hancur. Oleh sebab itu, penguasa yang baik adalah penguasa yang memberikan suasana kebahagiaan bukan sebaliknya.

Jurnal dari Prihatin Dwihantoro tentang *Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik* tahun 2013. Fokus penelitiannya adalah etika politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan adalam bentuk sikap yang bertatakrama dan perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

politik harus menjadi pedoman utama dengan politik santun, cerdas dan menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan.

Jurnal dari Mohamad Topan tentang *Kekuasaan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani Dalam Tinjaun Etika Politik* tahun 2013. Fokus penelitiannya adalah menjelaskan legitimasi kekuasaan yang menjadi dasar konsepsi kekuasaan menurut Taqiyuddin an-Nabhani ditinjau dari teori etika politik dan untuk memahami relevansinya bagi gerakan politik Hizbut Tahrir di Indonesia.

Jurnal dari Mateus Mali tentang *Revitalisasi Etika Sosial-Politik dalam Hidup Berdemokrasi* tahun 2011. Fokus penelitiannya adalah diskusi mengenai etika sosial dan politik yang memperlihatkan bahwa paham etika selalu mengandung empat tuntutan moral yang penting. *Pertama*, tuntutan demokrasi yang bermaksud memberikan situasi yang aktual pada prinsip-prinsip partisipatif dan representatif dalam sebuah sistem pemerintahan yang aktual. *Kedua*, tuntutan common good sebagai bentuk penyempurnaan manusia sehingga setiap orang dapat mengembangkan seluruh kemampuannya dalam kerja sama dengan individu yang lain dalam lingkup masyarakat dan komunitas tertentu. *Ketiga*, tuntutan kebebasan untuk menentukan diri sendiri sekaligus indepedensi terhadap orang lain. *Keempat*, tuntutan keadilan sosial untuk memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dan memperlakukan sesama manusia tanpa diskriminasi dalam segala situasi.

Jurnal dari Nunung Prajarto tentang *Etika: Keamanan Berpolitik dan Ber-New Media* tahun 2011. Fokus penelitiannya adalah etika dalam berpolitik dan ber-new media perlu dibenahi untuk menyisihkan kesemena-menaan

sehingga pada gilirannya mampu memberi jaminan keamanan bagi individu, kelompok dan masyarakat di dalamnya. Implementasi etika berpolitik dan ber-new media akan berimbas pada terciptanya keamanan atau kepastian.

Demikianlah kajian pustaka yang penulis temukan, baik dari tesis maupun jurnal. Namun, penelitian tentang pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani bukanlah yang pertama kali melainkan sudah pernah penulis lakukan dalam bentuk skripsi. Skripsi yang berjudul *Potensi Akal dalam Mengokohkan Akidah Islam Perspektif Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani* pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2018. Fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tentang potensi akal dalam mengokohkan akidah Islam dan mengetahui sebarapa jauh keterkaitan antara dominasi akidah Islam dan akal.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori etika politik dari al-Mawardi. Memahami pemikiran al-Mawardi bisa dilakukan dengan membaca karyanya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* sebagai *masterpiece*nya. Di dalam *magnum opus*nya ini tertulis prinsip-prinsip politik kontemporer, kekuasaan, yang pada masanya merupakan pemikiran yang maju bahkan hingga masa kini.[6] Salah satu pokok pemikiran al-Mawardi adalah mengenai hubungan agama dan negara. Al-Mawardi berpandangan bahwa dalam pembentukan sebuah negara, manusia harus melakukan kerja sama dengan yang lainnya karena manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tabiat alami untuk bermasyarakat dan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan

[6]Tim UIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 3.

sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya keberagaman, pembawaan, perbedaan bakat, kecenderungan alami, serta kemampuan yang menjadikan manusia bersatu dan saling membantu hingga akhirnya sepakat membentuk negara.[7]

Dalam pandangan al-Mawardi, berdirinya negara itu membutuhkan enam sendi utama. Sendi yang pertama adalah agama, sendi yang kedua adalah kharismatik, sendi yang ketiga adalah keadilan menyeluruh, sendi yang keempat adalah keamanan yang kuat dan menjamin, sendi yang kelima adalah kesuburan tanah, dan sendi yang keenam adalah harapan.[8] Keenam sendi tersebut merupakan pilar-pilar penyangga utama bagi kehidupan bermasyarakat dan selalu menjadi prinsip dasar membangun komunitas sosial. Tanpa itu, komunitas sosial menjadi rentan dalam menghadapi konflik-konflik sosial dan politik bagi yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari ancaman komunitas lain. Maka tampaklah bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu antara keduanya berhubungan secara timbal balik dan saling membutuhkan. Dan ini berarti bahwa agama membutuhkan negara. Bersama negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama negara bisa mendapatkan bimbingan etika dan moral.

Al-Mawardi menggambarkan secara jelas hubungan agama dan negara; *Kekuasaan akan kekal dengan agama dan agama akan kuat dengan kekuasaan.*[9] Selain itu, al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*khilafah atau imamah*) merupakan instrumen penting untuk melanjutkan misi

[7]Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Kairo: Mathba'ah al-Amiriyyah, 1955), h. 44.
[8]Al-Mawardi, *Adab al-Dunya*..., h. 136-147.
[9]Al-Mawardi, *Adab al-Dunya*..., h. 137-138.

kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Menurutnya, Allah mengangkat seorang pemimpin pengganti (*khalifah*) Nabi untuk mengamankan negara disertai dengan mandat politik. Maka seorang *imam* atau *khalifah* disebut juga pemimpin politik. Dalam teori politik al-Mawardi tidaka ada dikotomi antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Sejarah telah menunjukkan bahwa Rasulullah Saw telah memimpin Madinah, selain sebagai pembawa *risalah* (agama), ia juga merupakan pemimpin negara.[10]

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan sesuai dengan prosedur ilmiah dan terarah sehingga mencapai hasil yang diharapkan, maka perlu diterapkan metode-metode yang tepat dan sesuai dengan objek yang diteliti. Berbagai hal yang berkaitan dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.[11] Dalam penelitian ini, semua referensi yang memiliki keterhubungan dengan topik dan fokus yang dibahas, dalam hal ini Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko penulis kumpulkan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber utama atau primer dan sumber pendukung atau sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber

[10]Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), h. 5

[11]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

pertamanya.[12] Dalam hal ini, sumber primer adalah semua karya Taqiyuddin dan Haryatmoko maupun karya peneliti tentangnya yang secara khusus menjelaskan tentang konsep politiknya. Maka ada tiga karya Taqiyuddin an-Nabhani yang dijadikan sebagai referensi utama, yaitu *Mafahim Siyasiyah li Hizbut Tahrir*, *Takattul Hizbiy* dan *Daulah Islam*. Sumber Primer Haryatmoko yaitu: *Etika Politik dan Kekuasaan, Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, *Penerimaan Pluralitas Agama sebagai Kemungkinan Etika Politik*. Sedangkan sumber data sekunder yaitu karya-karya lain yang membahas tentang etika. Dalam hal ini berkaitan dengan buku-buku, jurnal ilmiah, buletin penelitian, tesis, disertasi, makalah dan lain-lain.[13] Sumber sekundernya adalah *Politik Perang Negara Khilafah Dalam Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani*. Sumber sekunder Haryatmoko adalah *Uang, Politik dan Kekuasaan: Adakah Peluang Bagi Etika Politik?*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan.[14] Langkah awal dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penulis terlebih dahulu mengumpulkan seluruh data yang ada, kemudian mengelompokkan data berdasarkan signifikansi data tersebut, apakah sebagai sumber primer maupun sekunder.

---

[12]Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 84.

[13]Brata, *Metode Penelitian...*, h. 18-19.

[14]Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 71.

4. Metode Analisa Data

Ada tiga metode yang dilakukan dalam melakukan analisa data (1) metode analisis yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan rincian terhadap obyek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian-pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.[15] (2) metode interpretasi yaitu metode untuk menemukan, menuturkan, serta mengungkapkan makna yang terkandung di dalam obyek yang diteliti.[16] (3) metode sintesis yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara mengumpulkan atau menggabungkan. Metode ini juga berarti cara untuk penanganan terhadap obyek ilmiah tertentu dengan jalan menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, yang pada akhirnya dapat diperoleh pengetahuan yang sifatnya baru.[17]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penjelasan laporan hasil penelitian ini, maka akan dibuat rangkaian pembahasan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

1. BAB I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Kegunaannya adalah sebagai kerangka awal dalam melakukan penelitian.

---

[15]Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 59.

[16]Kaelan, *Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pramadina, 2005), h. 148-149.

[17]Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat...*, h. 61.

2. BAB II berisi tentang Biografi Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko, sebagai landasan utama dalam menganalisis bab-bab berikutnya.
3. BAB III berisi penjelasan tentang etika politik al-Mawardi.
4. BAB IV berisi tentang pemikiran etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko.
5. BAB V berisi tentang Komparasi etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko.
6. BAB VI berisi tentang kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep etika politik Taqiyuddin an-Nabhani berorientasi kepada kebaikan dan kesejahteraan bersama. Konsep pemerintahan yang dikemukakan an-Nabhani terlihat berbeda dan unik karena antara Tuhan dan umat mempunyai peran dan fungsi yang berbeda akan tetapi saling terkait dengan erat dan mengikat. Legitimasi kekuasaan yang dikemukakan oleh an-Nabhani berdasarkan legitimasi yang dilakukan dilakukan oleh umat (rakyat) kepada seorang pemimpin yang disebut khalifah. Metode legitimasi kekuasaan terhadap khalifah dilakukan dengan cara di *baiat* atau diangkat oleh umat dan menjadikan khalifah mempunyai kewenangan tertinggi untuk melaksanakan aturan atau *syara'*. Proses pembaiatan khalifah dan proses menjalankan kepemimpinannya harus sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Dalam pandangan an-Nabhani, representasi kekuasaan yang lebih besar terlihat dalam bentuk sebuah *Daulah Khilafah Islamiyah* yang dipimpin oleh seorang khalifah.

Dimensi etis kekuasaan mempunyai tujuan sebagai media untuk menyebarkan Islam keseluruh dunia dengan cara dakwah. Kalimat *Laa Ilaha Illallah* merupakan inti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sawajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, sekaligus pendorong utama kegiatan dakwah yang dipahami sebagai wujud kepedulian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bahkan kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, rumah tangga dan negara, ekonomi, sosial, budaya dan syariat. Oleh karena itu, kekuasaan yang diraih adalah demi mewujudkan umat yang adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan ajaran Islam. Daulah Khilafah Islam yang berdiri kokoh di atas landasan *syara'* yang terpancar dari akidah Islam sebagai lembaga negara, sebagai sarana untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam masyarakat Islam. Taqiyuddin an-Nabhani dalam prakteknya melakukan aksi politik melalui Partai Pembebasan (Hizbut Tahrir) yang berideologi Islam dengan mendakwahkan perlunya membangkitkan *Daulah Khilafah Islamiyah* dan penerapan syariat Islam sebagai solusi permasalahan umat Islam di seluruh dunia saat ini.

Konsep etika politik Haryatmoko berorientasi kepada hidup baik, bersama dan untuk orang lain dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik ini membantu untuk menganalisis korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekedar etika individual perilaku individu dalam bernegara. Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan; *Pertama*, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain. *Kedua*, upaya memperluas lingkup kebebasan. *Ketiga*, membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. "Hidup baik bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan yang terakhir ini dimaksud adalah syarat fisik, sosial dan politik yang perlu demi pelaksanaan konkret kebebasan atau disebut democtaric liberties; kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya.

Komparasi etika politik Taqiyuddin an-Nabhani dan Haryatmoko menemukan adanya titik temu dan titik pisah diantara kedua tokoh tersebut. Titik temunya adalah bahwa Taqiyuddin An-Nabhani dan Haryatmoko melandasi legitimasi kekuasaannya dari rakyat kepada pemimpinnya dan adanya tiga dimensi dalam etika politiknya, yaitu tujuan, sarana dan aksi politik. Sedangkan titik pisah yaitu terkait dengan sistem pemerintahannya, Taqiyuddin an-Nabhani menghendaki sistem khilafah. Sistem khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim untuk menegakkan hukum Islam dengan mengemban dakwah ke seluruh dunia. Bentuk Negara Khilafah menurut Taqiyuddin adalah Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi berada dipusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan bukan pada pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah, tetapi kekuasaan tetap berada pada pemerintahan pusat. Sedangkan Haryatmoko masih menghendaki sistem Demokrasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut maka bisa ditemukan pemikiran yang sesuai dengan etika politik al-Mawardi sebagai kerangka teori dalam penelitian ini. Adapun hasilnya adalah etika politik Taqiyuddin an-Nabhani lebih sesuai dengan kerangka teori etika politik al-Mawardi. Karena Taqiyuddin an-Nabhani lebih menekankan etika politik yang berlandaskan akidah Islam yaitu tidak memisahkan antara politik dan agama. Sedangkan Haryatmoko terlihat lebih sekular yang masih memisahkan agama dan kehidupan. Kesesuaian etika politik Taqiyuddin an-Nabhani terlihat jelas dengan argumentasi mereka yang menyatakan bahwa agama dan negara berhubungan secara timbal balik dan saling membutuhkan yang berarti bahwa dengan adanya negara maka agama dapat berkembang dan begitupun sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama maka negara bisa mendapatkan bimbingan etika dan moral.

B. Saran

Etika politik memiliki posisi yang penting dalam kehidupan manusia. Maka sudah seharusnya etika politik diterapkan para elit politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi pemimpin dan rakyatnya. Adanya perbedaan konsep etika politik dalam beberapa tokoh, baik itu tokoh muslim maupun non muslim tidak lantas membuat kajian tentang etika politik di hindari ataupun di campakkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, adanya perbedaan dan persamaan harusnya bisa semakin memicu seseorang untuk semakin mempelajari dan memahami etika politik sebagai wawasan intelektual. Sehingga perbedaan semakin menambah wawasan seseorang terhadap pemikiran yang berbeda-beda untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memperkaya pengetahuannya. Sedangkan persamaan yang ada bisa semakin memperkuat pengetahuan seseorang tentang pentingnya menerapkan etika politik dalam kehidupan ini. Adapun mengenai hasil kesesuaian yang penulis temukan terkait kerangka teori etika politik al-Mawardi hanyalah memberikan sedikit wawasan saja, mungkin bisa dilengkapi dan disempurnakan lagi oleh peneliti yang selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A, Yahya. 2005. *Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir*, dalam Majalah al-wa'ie Edisi Khusus Maret.

Al-Anshari bin Manzhur, Jamaluddin Muhammad bin Mukarram. 1968. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Masyriq.

Al-Farabi, Abu Nashr. 1985. *Kitab Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah*, ed. by Albir al-Husniyyah. Beirut: Dar al-Masyiriq.

Al-Ghazali, Imam. 1518. *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Mesir: Makabbah al-Jundi.

Al-Khattami, Abdul Hayyie dan Nurdin, Kamaluddin. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Khowalidah, Bakar Salim. 1992. *As-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahan*. Amman: Hizbut Tahrir.

Al-Maududi, Abu A'la. 1984. *Esensi Al-Qur'an, Filsafat Politik Ekonomi Etika*, Terj. Ahmad Muslim, Bandung: Mizan.

Al-Mawardi. 1960. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

_____, 1955. *Adab al-Dunya wa al-Din*. Kairo: Mathba'ah al-Amiriyyah.

_____, 1981. *Tashil al-Nazhar wa Ta'jil al-Zhafar*. Beirut: Dar al-Nahdhah.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Al-Wa'ie No. 75 Tahun VII, 1-30 November 2006 M/Syawal 1427 H.

_____, No. 55, Edisi Khusus Maret 2005 M/Muharram 1426 H.

An-Nawiy, Fathiy Syamsudin Ramadhan. 2013. *Panduan Lurus Memahami Khilafah Islamiyah Menurut Kitab Kuning*. Jakarta: Wadi Press.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2015. *Peraturan Hidup Dalam Islam*. Jakarta: HTI-Press.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AR, Muchson. 2004. *Dimensi Moral Dalam Kekuasaan Politik*. Jurnal Civics, Vol. 1, No. 2, Desember. Universitas Negeri Yogyakarta.

_____,Taqiyuddin. 2011. *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah Jilid II*, Terj. Agung Wijayanti dkk. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.

Azhar, Muhammad. 2014. *Etika Politik Islam Studi Krisis Pemikiran Mohammad Arkoun*. Yogyakarta: CV. New Transmedia Communication Publisher.

Bertens, K. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia.

Bourdieu, Pierre. 1994. *Raisons Pratiques Sur la theorie de l'acton*. Paris: Seuil.

Brata, Sumardi Surya. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Cowie, A. P. 1990. *Oxford Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.

Diana, Rashda. 2018. *Pelembagaan Politik Negara Modern al-Mawardi*, Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Politik Islam PPS Universitas Muhammaduyah Yogyakarta.

Dodiman, M. Ali. 2007. *Biografi Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*. Yogyakarta: Granada Publisher.

_____, M. Ali. 2012. *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing.

Esposito, John L. 1995. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press.

Fakhry, Majid. 1996. *Ethical Theories in Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawiy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Giddens, Anthony. 1993. *New Rules of Sociological Method*. Cambridge: Polity Press.

Hambal, Ahmad bin. 2009. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, Jilid VI, No. 18406.

Hamidi, A. Lutfhi. 1996. *Penguasa dan Kekuasaan (Pemikiran Politik al-Mawardi)*, Tesis. Yogyakarta: PPs IAIN Sunan Kalijaga.

Haryatmoko, 2005. *Penerimaan Pluralitas Agama sebagai Syarat Kemungkinan Etika Politik*. UINISIA, No. 58.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Irawan, Chandra Purna. 2014. *Hukum Tata Negara Khilafah Islam*. Bandung: Dzafira Publishing.

Isjawara, F. 1995. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta.

Jacob, T. 2004. *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kaelan. 2005. *Metodologi Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pramadina.

Khaldun, Ibnu. 1958. *Muqaddimah Ibn Khaldun*, ed. by „Ali Abd. Al-Wahid Wafi. Kairo: Lajnah al-Bayan al-Arabiy, Cet. 1.

Ma'arif, M. Syafi'i. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.

Majid, Nurcholis. 1991. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Paramadina.

Miskawaih, Abu Ali Ahmad. 1999. *Tahdzibul al-Akhlak,* terj. Helmi Hidayat. Bandung: Mizan.

Mun'in Samara, Ihsan Abdul. 1987. *Mafhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil fikri al-Islamiyah Mu'ashirah*. Al-Quds: Mathba'ah ar-Risalah.

Murtadlo, Ali. 2012. *Jalinan Agama dan Negara dalam Islam*, dalam Ijtimaiyya, Vol. 5, No. 1, Lampung: IAIN Raden Intan.

Musawi Lari, Sayyid Mujtaba. 2001. *Etika dan Pertumbuhan Spritual*. Jakarta: Lentera.

Muzaffari, Mehdi. 1994. *Kekuasaan dalam Islam*, Terj. abdurrahman Ahmed, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Ritaudin, M Sidi. 2009. *Etika Politik Islam*. Jakarta: Transmisi Media.

Rodhi, Muhammad Muhsin. 2012. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah*. Bogor: Al-Azhar Fresh Zone Publishing.

Romas, Chumaidi Syarif. 2000. *Wacana Teologi Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Situmorang, Jubair. 2014. *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Sofyan, Ayi. 2002. *Etika Politik Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Suseno, Frans Magniz. 1994. *Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*. Jakarta: Gramedia.

Taqiyuddin. 2006. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.

Tim Hizbut Tahrir. 2014. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*. Jakarta: HTI-Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2016. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka.

Tim UIN Syarif Hidayatullah. 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Topan, Mohammad. 2013. *Kekuasaan Menurut Taqiyuddin an-Nabhani Dalam Tinjauan Etika Politik*. Jurnal Filsafat, Vol. 23, No. 2, Agustus. Dalam https://jurnal.ugm.ac.id/ wisdom/article/view/13218.

Triwijaya, Alba Roma. 2018. *Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun*. Lampung, Uin Raden Intan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA